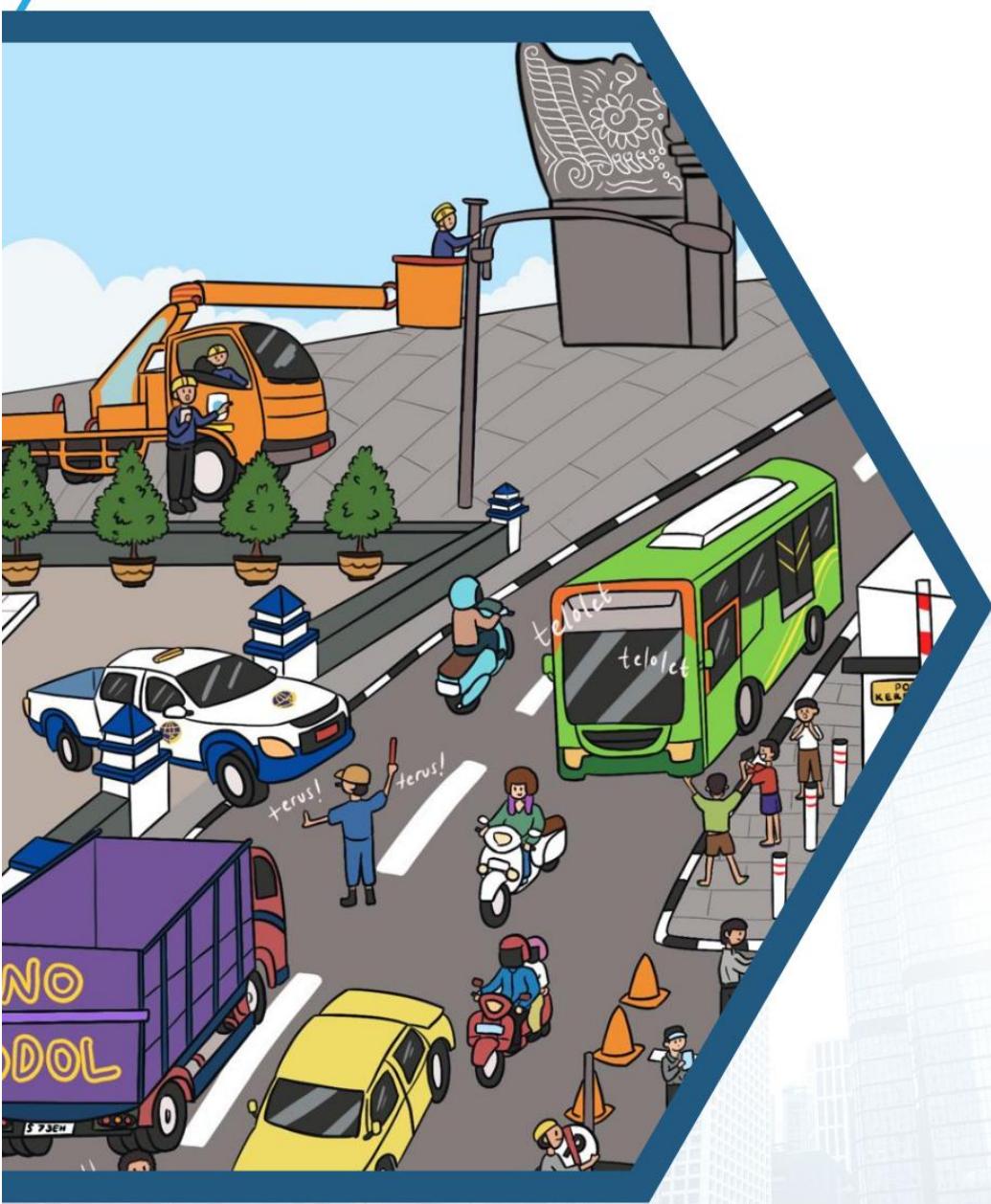


MANAJEMEN RISIKO

DINAS PERHUBUNGAN **TRIWULAN IV** 2025



 dishub_lamongan

 lamongankab.go.id/dishub

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dokumen Manajemen Risiko Dinas Perhubungan ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik pada Triwulan IV 2025.

Manajemen risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola organisasi yang baik. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko.

Penyusunan dokumen Manajemen Risiko ini di dasarkan pada resiko yang berpotensi terjadi dalam setiap tahapan kegiatan, dan transparansi, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal, sehingga evaluasi dan pembaruan akan dilakukan secara berkala.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Manajemen Risiko ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan

Mengetahui,
Kepala Dinas Perhubungan Lamongan

Drs. DIANTO HARI WIBOWO, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah. Dari risiko tersebut kemudian dilakukan analisis. Analisis risiko merupakan proses penilaian terhadap risiko yang teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level dan status risikonya.

Manajemen risiko sendiri merupakan proses perencanaan, pengaturan, dan pengontrolan aktivitas suatu organisasi, manajemen risiko memiliki sebutan lain yaitu sebuah cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik risiko itu sendiri sudah diketahui ataupun belum diketahui. Manajemen risiko dalam arti lain yaitu pendekatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko, yang mencakup penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, serta perlakuan risiko.

Manajemen risiko dilakukan untuk memetakan risiko yang berpeluang terjadi dalam suatu tahapan kegiatan birokrasi. Risiko yang dinilai berpotensi terjadi tentu harus dilakukan mitigasi agar dalam proses birokrasi suatu OPD dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Apabila manajemen risiko tidak dilakukan maka akan menghambat setiap tahapan kegiatan yang dilakukan dalam instansi pemerintahan

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan wajib dan perlu untuk melalukan manajemen risiko guna keberhasilan dalam pencapaian indikator dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala sehingga dapat diketahui risiko yang terjadi serta meminimalisir efek terjadinya risiko

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Peraturan Deputi Pengawasan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Manajemen Risiko dilakukan untuk memberikan informasi terkait risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan langkah-langkah preventif atau kuratif dalam penganggulangan terjadinya risiko pada pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

Sedangkan Tujuan Manajemen Risiko antara lain:

1. Mengelola risiko dalam pencapaian sasaran strategis organisasi pemerintah
2. Meningkatkan peluang organisasi dalam pencapaian target indikator kinerja
3. Mendorong terciptanya manajemen proaktif, solutif, dan antisipatif
4. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan organisasi berdasarkan data risiko yang akan terjadi

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Manajemen yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan antara lain berkaitan dengan dokumen, sumber daya manusia. Berikut merupakan rincian indicator dalam ruang lingkup yang dijelaskan:

1. Penentuan Kegiatan yang dilakukan pengelolaan risikonya
2. Identifikasi risiko
3. Analisis risiko
4. Pengendalian risiko
5. Pemantaua risiko, dan
6. Kooridinasi serta Komunikasi

BAB II
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH DAERAH

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan III

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pada Triwulan III terdapat dua Program yang berisikan 15 rencana kegiatan yang akan dilakukan pengelolaan manajemen risiko antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
9. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
10. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir
11. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
12. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
13. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
14. Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
15. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan kegiatan diatas dilakukan analisis terkait risiko beserta penyebab yang menjadikan adanya kemungkinan terjadinya risiko dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Berikut merupakan rincian tahapan kegiatan beserta pemetaan risiko yang telah dilakukan:

Tabel 2. 1 Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak	
				Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Data Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen perencanaan	ROO.25.15.27.01	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
			Permintaan data ke bidang	Risiko Operasional : Lambatnya pemenuhan data dari bidang	ROO.25.15.27.02	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
			Pengumpulan data dari bidang	Risiko Fraud : Memanipulasi data yang dikirimkan bidang	ROO.25.15.27.03	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
			Pengumpulan data dari bidang	Risiko Operasional: Format Data Tidak Sesuai Dengan Data yang diminta	ROO.25.15.27.04	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Tidak Ada Template untuk pengisian database (Material)	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
			Verifikasi data	Risiko Operasional : kurang teliti petugas dalam memverifikasi	ROO.25.15.27.05	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak	
				Uraian	Kode	Risiko		Uraian	Pihak yang Terkena
			Penginputan data	Risiko Operasional : kurang teliti petugas dalam memverifikasi	ROO.25.15.27.06	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)	Memperlambat penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Dinas Perhubungan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan RKA	Risiko Operasional : lambatnya bidang dalam menyusun anggarannya	ROO.25.15.27.07	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Koordinasi Internal Bidang yang Masih Berlangsung dan melebihi deadline yang telah ditentukan (man)	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
			Penetapan DPA	Risiko Pemangku Kebijakan : lambatnya proses pendatangannya penetapan DPA	ROO.25.15.27.08	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Proses chek and re-check yang masih berlangsung (methode)	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
			Verifikasi berkas dari bidang	Risiko Operasional : Berkas dari Bidang Tidak Lengkap	ROO.25.15.27.09	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (man)	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
			Pencairan Anggaran yang ada di DPA	Risiko Operasional : Terdapat Kesalahan Input Nominal Pencairan	ROO.25.15.27.10	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (man)	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan
			Penginputan data ke sistem	Risiko Operasional: Human error dalam penginputan data	ROO.25.15.27.11	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (man)	Memperlambat penyusunan dokumen administrasi Keuangan Daerah	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak		
				Uraian	Kode	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena	
					Risiko					
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kuantitas dan kualitas layanan administrasi kepegawaian	Verifikasi jabatan yang dibutuhkan	Risiko Operasional : Kurangnya pelatihan pada ASN	ROO.25.15.27.12	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya anggaran yang tersedia (Method)	Rendahnya kompetensi kualitas SDM	Dinas Perhubungan	
			Pengadaan dan penempatan pegawai	Risiko Pemangku Kebijakan : Tidak tersedianya formasi yang dibutuhkan	ROO.25.15.27.13	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya pengadaan ASN yg dilaksanakan secara berkala (Man)	Memperlambat hasil kinerja	Dinas Perhubungan	
			Penetapan DPA diklat	Risiko Operasional : Minimnya anggaran diklat yang tersedia	ROO.25.15.27.14	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya Anggaran Diklat untuk pendidikan dan pelatihan (Money)	Diklat tidak bisa dilakukan secara berkala	Dinas Perhubungan	
			Evaluasi dan kualitas pelayanan	Risiko Kebijakan : Tidak adanya SOP	ROO.25.15.27.15	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku (Material)	Lemahnya layanan kepegawaian	Dinas Perhubungan	
			Pengelolaan data dan informasi kepegawaian	Risiko Operasional : Penginputan dilakukan secara manual	ROO.25.15.27.16	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya peralatan IT yang tersedia (Machine)	Tidak tertibnya administrasi kepegawaian	Dinas Perhubungan	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penginputan Data	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	Risiko Operasional : Rendahnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	ROO.25.15.27.17	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya koordinasi pelayanan administrasi umum perangkat daerah (Material)	Kualitas pelayanan tidak sinkron	Dinas Perhubungan	
			Ketidaksesuaian Kompetensi	Risiko Operasional : Pegawai tidak memiliki keterampilan yang diperlukan (SDM PPJB)	ROO.25.15.27.18	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya SDM PPJB yang kompeten karena tidak mengikuti diklat (Man)	Terlambatnya pembuatan dokumen	Dinas Perhubungan	
			Perencanaan Anggaran yang Tidak Akurat	Risiko Operasional : Realisasi anggaran tidak sesuai perencanaan	ROO.25.15.27.19	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya ketersediaan anggaran yang tersedia (Money)	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	Dinas Perhubungan	
			Kelemahan sistem informasi	Risiko Operasional : Human error dalam penginputan data	ROO.25.15.27.20	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya peralatan IT (Machine)	Penyusunan dokumen tidak bisa dilakukan dengan sistematis	Dinas Perhubungan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak	
				Uraian	Kode	Risiko		Uraian	Pihak yang Terkena
			Proses Manual yang Inefisien	Risiko Operasional : Ketergantungan pada proses manual	ROO.25.15.27.21	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Proses yang berbelit-belit (Methode)	Pelayanan jadi terlambat	Dinas Perhubungan
5	Pengadaan Barang Milik Daerah	Penginputan Data	Pembuatan Rencana Kebutuhan	Risiko Fraud : Memanipulasi kebutuhan yang diusulkan	ROO.25.15.27.22	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya transparansi dalam proses kegiatan (Material)	Pengadaan tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan	Dinas Perhubungan
			Verifikasi Kebutuhan	Risiko Operasional : Kurangnya ketelitian dalam proses verifikasi	ROO.25.15.27.23	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya SDM PPJB yang kompeten (Man)	Terlambatnya pembuatan dokumen	Dinas Perhubungan
			Perencanaan dalam pengadaan	Risiko Fraud : Kurang adanya transparansi dalam penggunaan anggaran	ROO.25.15.27.24	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terjadinya pembekakan biaya (cost overrun) (Money)	Kegiatan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal	Dinas Perhubungan
			Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional: Gangguan teknis dalam pelaksanaan kegiatan	ROO.25.15.27.25	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terbatasnya peralatan pendukung (Machine)	Penyusunan dokumen tidak bisa dilakukan dengan sistematis	Dinas Perhubungan
			Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan efisiensi	Risiko Operasional : Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.25.15.27.26	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya SOP dalam pelaksanaan (Methode)	Terlambatnya proses pelaksanaan kegiatan	Dinas Perhubungan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penginputan Data	Identifikasi kebutuhan	Risiko Operasional : Kurangnya data kebutuhan yang akurat	ROO.25.15.27.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengerjaan data dilakukan dengan manual (Material)	Terlambatnya proses pembuatan dokumen kegiatan	Dinas Perhubungan
			Terbatasnya Sumber Daya Manusia	Risiko Operasional : Rendahnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang tersebut	ROO.25.15.27.28	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya adanya pelatihan (Man)	Penyusunan dokumen tidak bisa dilakukan dengan sistematis	Dinas Perhubungan
			Penatausahaan Keuangan	Risiko Operasional : Keterlambatan pembayaran tagihan	ROO.25.15.27.29	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya Komunikasi antar pihak (Money)	Terlambatnya proses pencairan kegiatan	Dinas Perhubungan
			Ketergantungan Teknologi	Risiko Operasional : Ketergantungan berlebihan pada sistem tertentu	ROO.25.15.27.30	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Terlalu banyaknya yang mengakses secara bersamaan (Machine)	Jika sistem down, operasional terhenti	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak	
				Uraian	Kode	Risiko		Uraian	Pihak yang Terkena
			Ketidaksesuaian Prosedur Kegiatan	Risiko Fraud : Proses pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti peraturan yang ditentukan	ROO.25.15.27.31	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya ketentuan yang baku (Methode)	Terlambatnya proses pencairan kegiatan	Dinas Perhubungan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penginputan Data	Tidak adanya kesesuaian spesifikasi	Risiko Operasional : Kualitas peralatan tidak sesuai dengan yang diinginkan	ROO.25.15.27.32	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya komunikasi dengan pihak penyedia (Material)	Kualitas peralatan cepat rusak	Dinas Perhubungan
			Keterbatasan/Ketidaksesuaian SDM	Risiko Operasional : Kurangnya personel yang kompeten atau tidak sesuai dengan keahlian dengan kebutuhan jasa	ROO.25.15.27.33	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penempatan personel yang tidak sesuai dengan keahliannya (Man)	Ketidakefektifan pelaksanaan tugas	Dinas Perhubungan
			Pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional : Keterlambatan pencairan dana	ROO.25.15.27.34	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Prosedur administrasi keuangan yang panjang (Money)	Keterlambatan pembayaran ke penyedia jasa/mitra kerja	Dinas Perhubungan
			Deteksi peralatan secara berkala	Risiko Operasional : Kerusakan peralatan utama	ROO.25.15.27.35	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penggunaan yang tidak sesuai prosedur (Machine)	Biaya perbaikan yang tinggi	Dinas Perhubungan
			Kurangnya Standar Kualitas	Risiko Operasional : Tidak adanya tolok ukur yang jelas untuk menilai hasil pekerjaan penyedia jasa	ROO.25.15.27.36	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Belum adanya SOP yang baku (Methode)	Kualitas layanan penunjang rendah, ketidakpuasan pengguna layanan	Dinas Perhubungan
8	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan dan perencanaan	Risiko Operasional : Minimnya SDM dalam penyusunan dan perencanaan kegiatan	ROO.25.15.27.37	Kepala Bidang Angkutan	Keterbatasan anggaran dalam memenuhi SDM (Money)	Memperlambat dalam penyusunan dan perencanaan	Dinas Perhubungan
			Pengumpulan data	Risiko Operasional : Data tidak akurat dan tidak relevan dengan kondisi riil	ROO.25.15.27.38	Kepala Bidang Angkutan	Kurangnya sumber daya (SDM, alat) untuk survei lapangan (Man)	Memperlambat dalam pengumpulan data	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak		
				Uraian	Kode	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena	
					Risiko					
			Penginputan data	Risiko Operasional: Human error dalam penginputan data	ROO.25.15.27.39	Kepala Bidang Angkutan	Kelelahan atau kurang fokus petugas dalam penginputan data (Man)	Hasil data menjadi tidak akurat	Dinas Perhubungan	
			Pelaksanaan sosialisasi	Risiko Operasional: Sosialisasi tidak efektif atau minim partisipasi	ROO.25.15.27.40	Kepala Bidang Angkutan	Minimnya kesadaran pengemudi terhadap peraturan yang ada (Methode)	Implementasi rencana tidak sesuai harapan	Dinas Perhubungan	
			Evaluasi	Risiko Operasional: Tidak tercapainya tujuan dan sasaran	ROO.25.15.27.41	Kepala Bidang Angkutan	Kekurangan personel terlatih, anggaran, atau teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data evaluasi (Methode)	Hasil evaluasi menjadi tidak akurat	Dinas Perhubungan	
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Terpasangnya Perlengkapan Sesuai Target	Penentuan titik pemasangan.	Risiko Operasional : Kesalahan dalam penentuan titik koordinat.	ROO.25.15.27.42	Kasi Perlengkapan Jalan	Kurang presisinya dalam penentuan titik koordinat (Methode)	Menyebabkan gangguan jarak pandang	Dinas Perhubungan	
			Penyusunan Rencana Anggaran (RAB):	Risiko Fraud : Adanya data inventaris yang tidak valid	ROO.25.15.27.43	Kasi Perlengkapan Jalan	Perubahan harga bahan baku (baja/cat) (Money)	Terlambatnya proses penyusunan laporan	Dinas Perhubungan	
			Proses Pengadaan Barang	Risiko Operasional : Potensi penyerahan barang menggunakan barang rekondisi	ROO.25.15.27.44	Kasi Perlengkapan Jalan	Tidak adanya Standar Barang yang baku atau kurang akurat sebagai dasar perencanaan (Material)	Terlambatnya proses pengadaan	Dinas Perhubungan	
			Mobilisasi & Pemasangan	Risiko Operasional : Adanya kecelakaan fisik pekerja	ROO.25.15.27.45	Kasi Perlengkapan Jalan	Kecelakaan kerja akibat petugas tidak memahami prosedur K3 di jalan (Man)	Terlambatnya proses pelaksaaan pemasangan	Dinas Perhubungan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak		
				Uraian	Kode	Risiko		Pemilik	Uraian	Pihak yang Terkena
			Serah Terima Pekerjaan	Risiko Operasional : Kesalahan dalam uji fungsi hasil pasang	ROO.25.15.27.46	Kasi Perlengkapan Jalan	Sistem pengujian masih bersifat manual (Machine)		Menyebabkan gangguan yang kurang sesuai dengan spektek	Dinas Perhubungan
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyusunan Data Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen perencanaan	ROO.25.15.27.52	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)		Terjadinya kesalahan pemenuhan data karena data yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diminta	Dinas Perhubungan
			Melakukan Sosialisasi	Risiko Pemangku Kebijakan : Lambatnya pemenuhan data dan informasi yang menyebabkan keterlambatan proses perizinan	ROO.25.15.27.53	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya pemahaman staf bidang terkait permintaan data yang dimaksud (Man)		Terulangnya permintaan perbaikan data sehingga memperlambat proses kerja dan penyelesaian laporan	Dinas Perhubungan
			Verifikasi permohonan	Risiko Fraud : Terjadinya manipulasi data yang tidak sesuai oleh pihak terkait dalam proses verifikasi permohonan.	ROO.25.15.27.54	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya Pengawasan dan proses verifikasi yang belum optimal (Man)		Data dan dokumen yang dihasilkan tidak tervalidasi dengan baik sehingga berisiko menimbulkan kesalahan administratif.	Dinas Perhubungan
			Penilaian teknis	Risiko Operasional: Format dan substansi data teknis yang disampaikan tidak sesuai sehingga menghambat proses penilaian.	ROO.25.15.27.55	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Tidak Ada Template untuk pengisian database (Material)		Ketidakteraturan dan ketidakkonsistenan format database yang menyulitkan proses pengolahan dan analisis data	Dinas Perhubungan
			Peninjauan lapangan	Risiko Operasional :Kurang teliti petugas dalam melakukan peninjauan lapangan .	ROO.25.15.27.56	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)		Ketidakteraturan dan ketidakkonsistenan format database yang menyulitkan proses pengolahan dan analisis data	Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak	
				Uraian	Kode	Risiko		Uraian	Pihak yang Terkena
			Penerbitan izin	Risiko Operasional : Kurang teliti petugas dalam melakukan pemeriksaan akhir dokumen izin sehingga terjadi kesalahan dalam penerbitan izin.	ROO.25.15.27.57	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Petugas Verifikasi Kurang teliti dalam proses verifikasi (Man)	Meningkatnya potensi kesalahan berulang karena proses verifikasi tidak dilakukan secara cermat	Dinas Perhubungan
			Pelaporan dan monitoring	Risiko Operasional : Keterlambatan penyusunan laporan dan kegiatan monitoring akibat lambatnya penyampaian data pendukung.	ROO.25.15.27.58	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Koordinasi Internal Bidang yang Masih Berlangsung dan melebihi deadline yang telah ditentukan (Man)	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pelaporan akibat koordinasi internal yang melebihi batas waktu	Dinas Perhubungan
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Teruji Secara Berkala	Mengajukan Permohonan Pelaksanaan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala di Loket Pendaftaran	Risiko informasi tata cara dan persyaratan tidak tersedia	ROO.25.15.27.59	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Kurangnya informasi tata cara dan persyaratan	Pendaftaran tidak dapat diproses	Pemilik kendaraan bermotor yang mengujikan kendaraannya
			Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan pendaftaran serta memastikan kehadiran kendaraan yang akan didaftarkan uji	Risiko persyaratan pendaftaran tidak lengkap	ROO.25.15.27.60	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Kurangnya informasi tata cara dan persyaratan	Pendaftaran tidak dapat diproses	Pemilik kendaraan bermotor yang mengujikan kendaraannya
			Memeriksa kendaraan bermotor sesuai data yang tercantum dalam hasil pemeriksaan administrasi dengan fisik kendaraan	Risiko kendaraan tidak laik jalan	ROO.25.15.27.61	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Kendaraan perlu perbaikan	Keselamatan pengguna kendaraan bermotor	Pemilik kendaraan bermotor yang mengujikan kendaraannya
			Memasukan ke database aplikasi SIMPKB, Membuat kartu induk uji berkala, Memberikan nomor uji kendaraan, Menerbitkan bukti pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala	Risiko ketersediaan jaringan internet terputus	ROO.25.15.27.62	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Faktor cuaca	Cetak bukti lulus uji tidak dapat diproses	Pengguna kendaraan bermotor

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak		
				Uraian	Kode	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena	
					Risiko					
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan dan atau perencanaan kegiatan survay	Risiko Operasional : kurangnya sdm dalam pemahaman sistem perencanaan kegiatan	ROO.25.15.27.63	Kepala Bidang Angkutan	Perlunya pelatihan terhadap SDM bidang perencanaan kegiatan (Methode)	Ketidaktepatan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan	Dinas Perhubungan	
			Pengumpulan data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Kesalahan dalam pengumpulan data	ROO.25.15.27.64	Kepala Bidang Angkutan	Banyaknya data yang perlu dikumpulkan (Methode)	Tertundanya pengumpulan data	Dinas Perhubungan	
			Input data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Gangguan sistem atau perangkat lunak	ROO.25.15.27.65	Kepala Bidang Angkutan	Perangkat lunak yang belum terupdate (Material)	Pekerjaan tertunda atau kehilangan data	Dinas Perhubungan	
			Analisa data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Kurangnya jumlah SDM dalam menganalisis	ROO.25.15.27.66	Kepala Bidang Angkutan	Terbatasnya anggaran dalam pemenuhan SDM (Money)	Kesalahan dalam menganalisis data	Dinas Perhubungan	
			Penyajian data	Risiko Operasional : Keterlambatan dalam proses penyajian data	ROO.25.15.27.67	Kepala Bidang Angkutan	Antrian pekerjaan atau kendala teknis menyebabkan analisis terlambat (Man)	Tertundanya dalam penyajian data	Dinas Perhubungan	
13	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Lalu Lintas	Risiko Fraud : Manipulasi data survei untuk mempercepat proses	ROO.25.15.27.68	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Pengendalian internal yang lemah dan kurangnya pengawasan lapangan dalam pelaksanaan survei(Method)	Hasil survei kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi lapangan sebenarnya.	Dinas Perhubungan	
			Analisis Dampak Lalu Lintas	Risiko Operasional :Kesalahan perhitungan LOS/proyeksi lalu lintas	ROO.25.15.27.69	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam melakukan perhitungan teknis serta keterbatasan kompetensi analisis lalu lintas (Man)	Kesalahan dalam hasil analisis teknis lalu lintas yang berpotensi menghasilkan rekomendasi yang tidak tepat.	Dinas Perhubungan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak		
				Uraian	Kode	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena	
					Risiko					
			Penyusunan Dokumen Andalalin	Risiko Operasional :Human error dalam penyusunan data	ROO.25.15.27.70	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses penyusunan dan penginputan data (Man)	Ketidaksesuaian antara data input dengan kondisi riil yang berdampak pada rendahnya keandalan data	Dinas Perhubungan	
			Pengajuan data	Risiko Operasional: kesalahan dalam pengajuan data	ROO.25.15.27.71	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (Man)	Dokumen administrasi tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan sehingga menghambat proses evaluasi dan audit	Dinas Perhubungan	
			Melaksanakan tindakan mitigasi	Risiko Fraud : Penggunaan anggaran mitigasi tidak sesuai ketentuan	ROO.25.15.27.72	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Minimnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran serta keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku (Money)	Terjadinya penyimpangan atau ketidaktepatan penggunaan anggaran akibat lemahnya pengawasan.	Dinas Perhubungan	
14	Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LL AJ di Jalan	Tahap Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen audit dan inspeksi keselamatan	ROO.25.15.27.73	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Terbatasnya sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait audit dan inspeksi keselamatan(Man)	Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan kurang optimal karena keterbatasan kompetensi petugas	Dinas Perhubungan	
			Tahap Pengumpulan Data	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami data yang akan dikaji	ROO.25.15.27.74	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses pemenuhan dokumen (Man)	Menghambat proses verifikasi dan pelaporan.	Dinas Perhubungan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak		
				Uraian	Kode	Pemilik		Uraian	Pihak yang Terkena	
					Risiko					
			Tahap kegiatan lapangan / PAM	Risiko Fraud : Terjadinya manipulasi data yang tidak sesuai dengan yang ada	ROO.25.15.27.75	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dalam pengelolaan dan validasi data (Material)	Tidak adanya standar yang seragam dalam pengelolaan dan validasi data sehingga proses kerja tidak konsisten	Dinas Perhubungan	
			Tahap Identifikasi Masalah Keselamatan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami tentang masalah yang di identifikasi	ROO.25.15.27.76	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses mengidentifikasi masalah (Man)	Proses pengolahan data menjadi lambat dan tidak efisien	Dinas Perhubungan	
			Tahap Analisis Risiko Keselamatan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami tentang masalah yang di identifikasi	ROO.25.15.27.77	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses mengidentifikasi masalah (Man)	Proses pengolahan data menjadi lambat dan tidak efisien	Dinas Perhubungan	
			Tahap Penyusunan Rekomendasi	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen rekomendasi yang akan disusun	ROO.25.15.27.78	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Kurangnya ketelitian petugas dalam proses mengidentifikasi masalah (Man)	Proses pengolahan data menjadi lambat dan tidak efisien	Dinas Perhubungan	
15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan perencanaan kegiatan Bimbingan teknis bagi pengemudi	Risiko Operasional : Keterbatasan SDM dalam Perencanaan	ROO.25.15.27.87	Kepala Bidang Angkutan	Tim penyusun kegiatan memiliki beban kerja tinggi (Man)	Memperlambat penyusunan dan perencanaan kegiatan	Dinas Perhubungan	
			Pengumpulan data pengemudi angkutan orang dan barang	Risiko Operasional : Kapasitas SDM Pengolah Data Terbatas	ROO.25.15.27.88	Kepala Bidang Angkutan	Banyaknya data yang perlu dikumpulkan (Man)	Potensi kesalahan input dan keterlambatan.	Dinas Perhubungan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Sebab	Dampak		
				Uraian	Kode	Pemilik		Uraian	Uraian	
					Risiko				Pihak yang Terkena	
			Pelaksanaan bimbingan teknis pengemudi angkutan orang dan angkutan barang	Risiko Operasional : Peserta pasif atau tidak mendengarkan	ROO.25.15.27.89	Kepala Bidang Angkutan	Peserta Tidak Fokus atau Kurang Berpartisipasi (Man)	Bimbingan tidak efektif dan pengemudi kurang memahami materi	Dinas Perhubungan	
			Evaluasi dampak dari hasil kegiatan bimbingan teknis angkutan orang dan barang	Risiko Operasional : Kesalahan input data atau perhitungan yang menyebabkan hasil evaluasi salah	ROO.25.15.27.90	Kepala Bidang Angkutan	Tim evaluasi tidak cukup jumlah atau jadwal terlalu mepet sehingga analisis kurang mendalam (Man)	Hasil evaluasi tidak maksimal	Dinas Perhubungan	
			Pelaksanaan pembinaan dilapangan terkait peraturan kelalu lintasan bagi pengemudi angkutan orang dan angkutan barang	Risiko Operasional : Pengemudi angkutan yang masih tidak tertib	ROO.25.15.27.91	Kepala Bidang Angkutan	Materi yang disampaikan kurang dapat diterima oleh pengemudi karena sudah terbiasa tidak tertib (Methode)	Pembinaan tidak efektif dan pengemudi kurang memahami aturan	Dinas Perhubungan	

A. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan III

Berdasarkan rencana kegiatan pengelolaan risiko maka dilakukan pengendalian risiko yang terjadi pada triwulan IV 2025. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan setiap risiko yang teridentifikasi akan dilakukan pembobotan dari aspek dampak dan kemungkinan. Maka, dari pembobotan tersebut akan diketahui dari risiko tersebut perlu dilakukan RTP lebih lanjut atau risiko bisa diterima dan diatasi serta tidak memerlukan tindakan. Berikut merupakan realisasi kegiatan Pengelolaan Risiko Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pada Triwulan tiga 2025:

Tabel 2. 2 Formulir Hasil Analisis Resiko Dinas Perhubungan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Data Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen perencanaan	ROO.25.15.27.01	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data	
			Permintaan data ke bidang	Risiko Operasional : Lambatnya pemenuhan data dari bidang	ROO.25.15.27.02	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	3	6	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data	
			Pengumpulan data dari bidang	Risiko Fraud : Memanipulasi data yang dikirimkan bidang	ROO.25.15.27.03	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	4	1	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	
			Pengumpulan data dari bidang	Risiko Operasional: Format Data Tidak Sesuai Dengan Data yang diminta	ROO.25.15.27.04	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data serta memberikan gambaran template yang akan digunakan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Verifikasi data	Risiko Operasional : kurang teliti ny petugas dalam memverifikasi	ROO.25.15.27.05	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	2	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan	
			Penginputan data	Risiko Operasional : kurang teliti ny petugas dalam memverifikasi	ROO.25.15.27.06	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	2	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang tidak sesuai.	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyusunan RKA	Risiko Operasional : lambatnya bidang dalam menyusun anggarannya	ROO.25.15.27.07	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	3	6	Memberikan tenggat waktu terhadap masing - masing bidang dalam proses penyusunan RKA	
			Penetapan DPA	Risiko Pemangku Kebijakan : lambatnya proses pendandatanganan penetapan DPA	ROO.25.15.27.08	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	3	6	Melakukan koordinasi secara intens kepada mitra bidang terkait	
			Verifikasi berkas dari bidang	Risiko Operasional : Berkas dari Bidang Tidak Lengkap	ROO.25.15.27.09	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait dokumen yang harus dipenuhi	
			Pencairan Anggaran yang ada di DPA	Risiko Operasional : Terdapat Kesalahan Input Nominal Pencairan	ROO.25.15.27.10	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	1	2	Melakukan revisi terhadap dokumen yang memiliki kesalahan	
			Penginputan data ke sistem	Risiko Operasional: Human error dalam penginputan data	ROO.25.15.27.11	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan	2	2	4	Melakukan revisi terhadap dokumen yang memiliki kesalahan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendali an yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kuantitas dan kualitas layanan administrasi kepegawaian	Verifikasi jabatan yang dibutuhkan	Risiko Operasional : Kurangnya pelatihan pada ASN	ROO.25.15.27.12	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Mendorong ASN untuk mengembangkan kompetensi	
			Pengadaan dan penempatan pegawai	Risiko Pemangku Kebijakan : Tidak tersedianya formasi yang dibutuhkan	ROO.25.15.27.13	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai formasi yang dibutuhkan	
			Penetapan DPA diklat	Risiko Operasional : Minimnya anggaran diklat yang tersedia	ROO.25.15.27.14	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Pelaksanaan diklat tidak bisa dilaksanakan secara berkala	
			Evaluasi dan kualitas pelayanan	Risiko Kebijakan : Tidak adanya SOP	ROO.25.15.27.15	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan evaluasi secara berkala	
			Pengelolaan data dan informasi kepegawaian	Risiko Operasional : Penginputan dilakukan secara manual	ROO.25.15.27.16	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Penambahan peralatan IT untuk ASN	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penginputan Data	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perangkat daerah	Risiko Operasional : Rendahnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	ROO.25.15.27.17	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Menyamakan persepsi dalam meningkatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	
			Ketidaksesuaian Kompetensi	Risiko Operasional : Pegawai tidak memiliki keterampilan yang diperlukan (SDM PPJB)	ROO.25.15.27.18	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Mendorong ASN untuk mengembangkan kompetensi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa	
			Perencanaan Anggaran yang Tidak Akurat	Risiko Operasional : Realisasi anggaran tidak sesuai perencanaan	ROO.25.15.27.19	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Memaksimalkan anggaran yang tersedia	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendali an yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Kelemahan sistem informasi	Risiko Operasional : Human error dalam penginputan data	ROO.25.15.27.20	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan perbaikan sistem secara berkala	
			Proses Manual yang Inefisien	Risiko Operasional : Ketergantungan pada proses manual	ROO.25.15.27.21	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Membuat system yang lebih efisien	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah	Penginputan Data	Pembuatan Rencana Kebutuhan	Risiko Fraud : Memanipulasi kebutuhan yang diusulkan	ROO.25.15.27.22	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan indentifikasi dan verifikasi secara berkala	
			Verifikasi Kebutuhan	Risiko Operasional : Kurangnya ketelitian dalam proses verifikasi	ROO.25.15.27.23	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan Pendidikan dan Pelataihan terkait PPBJ	
			Perencanaan dalam pengadaan	Risiko Fraud : Kurang adanya transparansi dalam penggunaan anggaran	ROO.25.15.27.24	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan pengawasan secara berkala	
			Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional: Gangguan teknis dalam pelaksanaan kegiatan	ROO.25.15.27.25	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Memastikan ketersediaan infratruktur teknologi	
			Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan efisiensi	Risiko Operasional : Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.25.15.27.26	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penginputan Data	Identifikasi kebutuhan	Risiko Operasional : Kurangnya data kebutuhan yang akurat	ROO.25.15.27.27	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Pembuatan dokumen dilakukan dengan sistematis	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Terbatasnya Sumber Daya Manusia	Risiko Operasional : Rendahnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang tersebut	ROO.25.15.27.28	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan pelatihan secara berkala dan disiapkan regenerasi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	
			Penatausahaan Keuangan	Risiko Operasional : Keterlambatan pembayaran tagihan	ROO.25.15.27.29	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Memastikan kelengkapan dokumen tagihan tepat waktu dan mempercepat proses verifikasi pembayaran	
			Ketergantungan Teknologi	Risiko Operasional : Ketergantungan berlebihan pada sistem tertentu	ROO.25.15.27.30	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Pelatihan teknis bagi pengguna, dan dukungan IT yang responsif	
			Ketidaksesuaian Prosedur Kegiatan	Risiko Fraud : Proses pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti peraturan yang ditentukan	ROO.25.15.27.31	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Penyusunan pedoman/SOP yang jelas	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penginputan Data	Tidak adanya kesesuaian spesifikasi	Risiko Operasional : Kualitas peralatan tidak sesuai dengan yang diinginkan	ROO.25.15.27.32	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan verifikasi guna meminimalisir ketidaksesuaian spesifikasi yang diinginkan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Keterbatasan/Ketidaksesuaian SDM	Risiko Operasional : Kurangnya personel yang kompeten atau tidak sesuai dengan keahlian dengan kebutuhan jasa	ROO.25.15.27.33	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Penempatan staf berdasarkan kompetensi	
			Pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional : Keterlambatan pencairan dana	ROO.25.15.27.34	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Percepatan proses verifikasi dokumen	
			Deteksi peralatan secara berkala	Risiko Operasional : Kerusakan peralatan utama	ROO.25.15.27.35	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Dilakukan deteksi dini peralatan mesin yang tersedia	
			Kurangnya Standar Kualitas	Risiko Operasional : Tidak adanya tolok ukur yang jelas untuk menilai hasil pekerjaan penyedia jasa	ROO.25.15.27.36	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2	1	2	Menyusun dan mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terperinci	
8	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan dan perencanaan	Risiko Operasional : Minimnya SDM dalam penyusunan dan perencanaan kegiatan	ROO.25.15.27.37	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan optimalisasi pemanfaatan SDM yang ada	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Pengumpulan data	Risiko Operasional : Data tidak akurat dan tidak relevan dengan kondisi riil	ROO.25.15.27.38	Kepala Bidang Angkutan	2	3	6	Dilakukan verifikasi dan validasi data secara berkala	
			Penginputan data	Risiko Operasional: Human error dalam penginputan data	ROO.25.15.27.39	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan evaluasi berkala guna meningkatkan ketelitian dan keandalan proses pengelolaan data	
			Pelaksanaan sosialisasi	Risiko Operasional: Sosialisasi tidak efektif atau minim partisipasi	ROO.25.15.27.40	Kepala Bidang Angkutan	2	1	2	Dilakukan perencanaan kegiatan sosialisasi yang terstruktur dengan penetapan sasaran, materi, dan metode yang sesuai	
			Evaluasi	Risiko Operasional: Tidak tercapainya tujuan dan sasaran	ROO.25.15.27.41	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan pembagian tugas secara proporsional, serta pemanfaatan media dan aplikasi evaluasi yang efisien	
9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Terpasangnya Perlengkapan Sesuai Target	Penentuan titik pemasangan.	Risiko Operasional : Kesalahan dalam penentuan titik koordinat.	ROO.25.15.27.42	Kasi Perlengkapan Jalan	2	1	2	Melakukan koordinasi dan verifikasi titik oleh tim teknis	
			Penyusunan Rencana Anggaran (RAB):	Risiko Fraud : Adanya data inventaris yang tidak valid	ROO.25.15.27.43	Kasi Perlengkapan Jalan	2	2	4	Pencantuman klausul harga eskalasi atau menggunakan harga satuan terbaru dari SHSR.	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Proses Pengadaan Barang	Risiko Operasional : Potensi penyerahan barang menggunakan barang rekondisi	ROO.25.15.27.44	Kasi Perlengkapan Jalan	1	1	1	Melakukan inspeksi dan koordinasi sebelum pengiriman barang dilakukan	
			Mobilisasi & Pemasangan	Risiko Operasional : Adanya kecelakaan fisik pekerja	ROO.25.15.27.45	Kasi Perlengkapan Jalan	2	3	6	Pelatihan singkat K3 dan pengawasan ketat	
			Serah Terima Pekerjaan	Risiko Operasional : Kesalahan dalam uji fungsi hasil pasang	ROO.25.15.27.46	Kasi Perlengkapan Jalan	1	1	1	Penggunaan alat yang sudah termodernisasi	
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penyusunan Data Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen perencanaan	ROO.25.15.27.52	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data	
			Melakukan Sosialisasi	Risiko Pemangku Kebijakan : Lambatnya pemenuhan data dan informasi yang menyebabkan keterlambatan proses perizinan	ROO.25.15.27.53	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data	
			Verifikasi permohonan	Risiko Fraud : Terjadinya manipulasi data yang tidak sesuai oleh pihak terkait dalam proses verifikasi permohonan.	ROO.25.15.27.54	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	4	1	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Penilaian teknis	Risiko Operasional: Format dan substansi data teknis yang disampaikan tidak sesuai sehingga menghambat proses penilaian.	ROO.25.15.27.55	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data serta memberikan gambaran template yang akan digunakan	
			Peninjauan lapangan	Risiko Operasional :Kurang teliti ny petugas dalam melakukan peninjauan lapangan .	ROO.25.15.27.56	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan	
			Penerbitan izin	Risiko Operasional : Kurang teliti ny petugas dalam melakukan pemeriksaan akhir dokumen izin sehingga terjadi kesalahan dalam penerbitan izin.	ROO.25.15.27.57	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif dan tidak sesuai dengan	
			Pelaporan dan monitoring	Risiko Operasional : Keterlambatan penyusunan laporan dan kegiatan monitoring akibat lambatnya penyampaian data pendukung.	ROO.25.15.27.58	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Memberikan tenggat waktu terhadap masing - masing bidang dalam proses penyusunan RKA	
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Teruji Secara Berkala	Mengajukan Permohonan Pelaksanaan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala di Loket Pendaftaran	Risiko informasi tata cara dan persyaratan tidak tersedia	ROO.25.15.27.59	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	3	3	Pemasangan papan informasi	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendali an yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Memeriksa dan memastikan kesesuaian kelengkapan pendaftaran serta memastikan kehadiran kendaraan yang akan didaftarkan uji	Risiko persyaratan pendaftaran tidak lengkap	ROO.25.15.27.60	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	3	3	Mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi oleh pemilik kendaraan	
			Memeriksa kendaraan bermotor sesuai data yang tercantum dalam hasil pemeriksaan administrasi dengan fisik kendaraan	Risiko kendaraan tidak laik jalan	ROO.25.15.27.61	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	2	2	Mengembalikan kendaraan untuk dilakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan laik jalan & Sosialisasi Kendaraan Bermotor Berkeselamatan	
			Memasukan ke database aplikasi SIMPKB, Membuat kartu induk uji berkala, Memberikan nomor uji kendaraan, Menerbitkan bukti pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala	Risiko ketersediaan jaringan internet terputus	ROO.25.15.27.62	KUPT Pengujian Kendaraan Bermotor	4	2	8	Menjaga dan memelihara peralatan yang berhubungan dengan jaringan internet	
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan dan atau perencanaan kegiatan survay	Risiko Operasional : kurangnya sdm dalam pemahaman sistem perencanaan kegiatan	ROO.25.15.27.63	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan pembagian tugas sesuai tingkat pemahaman	
			Pengumpulan data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Kesalahan dalam pengumpulan data	ROO.25.15.27.64	Kepala Bidang Angkutan	2	3	6	Dilakukan penetapan standar dan klasifikasi data yang jelas dan penetapan prioritas data yang bersifat utama	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Input data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Gangguan sistem atau perangkat lunak	ROO.25.15.27.65	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Pemantauan kondisi sistem, serta pencadangan data (backup) secara rutin	
			Analisa data primer dan data sekunder	Risiko Operasional : Kurangnya jumlah SDM dalam menganalisis	ROO.25.15.27.66	Kepala Bidang Angkutan	2	1	2	Optimalisasi pemanfaatan SDM yang ada melalui pembagian tugas yang jelas	
			Penyajian data	Risiko Operasional : Keterlambatan dalam proses penyajian data	ROO.25.15.27.67	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan pengaturan prioritas pekerjaan berdasarkan urgensi dan tenggat waktu	
13	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data Lalu Lintas	Risiko Fraud : Manipulasi data survei untuk mempercepat proses	ROO.25.15.27.68	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Melakukan koordinasi secara intens kepada mitra bidang terkait	
			Analisis Dampak Lalu Lintas	Risiko Operasional :Kesalahan perhitungan LOS/proyeksi lalu lintas	ROO.25.15.27.69	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait dokumen yang harus dipenuhi	
			Penyusunan Dokumen Andalalin	Risiko Operasional :Human error dalam penyusunan data	ROO.25.15.27.70	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	1	2	Melakukan revisi terhadap dokumen yang memiliki kesalahan	
			Pengajuan data	Risiko Operasional: kesalahan dalam pengajuan data	ROO.25.15.27.71	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Melakukan revisi terhadap dokumen yang memiliki kesalahan	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Melaksanakan tindakan mitigasi	Risiko Fraud : Penggunaan anggaran mitigasi tidak sesuai ketentuan	ROO.25.15.27.72	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Memberikan tindakan tegas kepada yang bersangkutan apabila ditemukan data yang manipulatif	
14	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Tahap Perencanaan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen audit dan inspeksi keselamatan	ROO.25.15.27.73	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Melakukan koordinasi secara intens kepada mitra bidang terkait	
			Tahap Pengumpulan Data	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami data yang akan dikaji	ROO.25.15.27.74	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait	
			Tahap kegiatan lapangan / PAM	Risiko Fraud : Terjadinya manipulasi data yang tidak sesuai dengan yang ada	ROO.25.15.27.75	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	3	3	9	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data	
			Tahap Identifikasi Masalah Keselamatan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami tentang masalah yang diidentifikasi	ROO.25.15.27.76	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data	
			Tahap Analisis Risiko Keselamatan	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami tentang masalah yang diidentifikasi	ROO.25.15.27.77	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	2	4	Memberikan pemahaman kepada staf mitra bidang terkait pemahaman data	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Tahap Penyusunan Rekomendasi	Risiko Operasional : Petugas kurang memahami dokumen rekomendasi yang akan disusun	ROO.25.15.27.78	Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	2	3	6	Melakukan koordinasi secara intens kepada mitra bidang terkait	
15	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan perencanaan kegiatan Bimbingan teknis bagi pengemudi	Risiko Operasional : Keterbatasan SDM dalam Perencanaan	ROO.25.15.27.87	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Optimalisasi pemanfaatan SDM yang ada melalui pembagian tugas yang jelas	
			Pengumpulan data pengemudi angkutan orang dan barang	Risiko Operasional : Kapasitas SDM Pengolah Data Terbatas	ROO.25.15.27.88	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan penetapan prioritas data yang bersifat utama	
			Pelaksanaan bimbingan teknis pengemudi angkutan oran dan angkutan barang	Risiko Operasional : Peserta pasif atau tidak mendengarkan	ROO.25.15.27.89	Kepala Bidang Angkutan	2	1	2	Pemantauan keterlibatan peserta selama kegiatan dan pemberian umpan balik untuk mendorong partisipasi aktif peserta	
			Evaluasi dampak dari hasil kegiatan bimbingan teknis angkutan orang dan barang	Risiko Operasional : Kesalahan input data atau perhitungan yang menyebabkan hasil evaluasi salah	ROO.25.15.27.90	Kepala Bidang Angkutan	2	1	2	Penerapan prosedur pemeriksaan ulang (review) dan validasi data	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Pelaksanaan Kegiatan	Risiko			Analisis Risiko			Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	
				Uraian	Kode	Pemilik	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
					Risiko						
			Pelaksanaan pembinaan dilapangan terkait peraturan kelalu lintasan bagi pengemudi angkutan orang dan angkutan barang	Risiko Operasional : Pengemudi angkutan yang masih tidak tertib	ROO.25.15.27.91	Kepala Bidang Angkutan	2	2	4	Dilakukan penerapan metode pembinaan yang lebih interaktif dan persuasif	

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan rencana dan realisasi pengelolaan risiko pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa risiko yang terjadi. Namun, jika melihat hasil pembobotan analisis risiko yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mayoritas risiko yang terjadi tidak memerlukan tindakan yang berdasar pada Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dalam implementasinya hambatan yang terjadi bersifat minor sehingga tidak terlalu menganggu kegiatan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah pada Triwulan III.

BAB IV

MONITORING RISIKO DAN RTP

Monitoring Risiko dan RTP

Berdasarkan hasil monitoring risiko dan Rencana Tindak Pengendalian manajemen risiko yang telah disusun, hasilnya Dinas Perhubungan mampu untuk mengendalikan risiko yang telah dipetakkan. Upaya Pengendalian yang saat ini yang telah dilakukan tentu berjalan dengan baik, sehingga risiko yang telah dipetakkan bisa di minimalisir melalui tindak pengendalian yang sudah ada saat ini selama tribulan III yang sesuai dengan tabel

BAB V

PENUTUP

Penutup

Berdasarkan hasil Manajemen Risiko yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Lamongan tentu sudah di petakkan berdasarkan setiap tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Penilaian skala juga sudah dilakukan sebagai langkah untuk menentukan tindak pengendalian selanjutnya berdasarkan skala kemungkinan dan skala dampak yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati Lamongan No. 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Hasilnya adalah Dinas Perhubungan mampu untuk meminimalisir terjadinya risiko operasional yang berpotensi menghambat tujuan organisasi pada Triwulan IV tahun 2025 Hal ini tercermin dengan pengendalian risiko yang sudah ada saat ini telah dilaksanakan dengan baik sehingga risiko yang telah dipetakkan dapat diminimalisir terjadinya risiko tersebut.

Dinas Perhubungan terus berkomitmen untuk senantiasa melakukan tindak mitigasi atau pengendalian terhadap risiko yang berpotensi terjadi di setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan demi mencapai tujuan strategis Organisasi Perangkat Daerah.